



KONFLIK MALUKU DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN MALIKO

¹Jumidi Elewahan, ²Ilmiawan Mubin, ³Maria Yasinta Serena

^{1,2,3}Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹jumidielewahan@gmail.com, ²ilmiawanmubin@gmail.com, ³mariayasintaserena@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 03-11-2019

Disetujui: 30-12-2019

Kata Kunci:

Konflik Maluku,
Perjanjian Maliko.

ABSTRAK

Abstrak: Setelah peristiwa reformasi yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan Negara dalam posisi lemah. Hal ini memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksinya seperti yang terjadi di Maluku oleh kaum Kristen Maluku untuk memlemparkan dendamnya kepada kaum Islam dan sebaliknya konflik yang terjadi di Maluku 19 Januari 1999 kemudian berjalan dalam beberapa tahun (selanjutnya disebut konflik Maluku), telah mengakibatkan kematian dan penderitaan umat manusia, penghancuran harta benda, pemaksaan pindah agama, secara terpaksa dan berbagai akibat buruk lainnya. Dipandang sebagai konflik yang dimiliki sekelompok kerusak, kejahatan dan pelanggaran, hak-hak asasi manusia (HAM), sangat tinggi dan menjadi catatan sejarah yang kelam dan sangat buruk dalam perjalanan peradaban umat manusia. Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan (*library research*) dengan metode sejarah, penelitian kepustakaan dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian-penelitian kepustakaan hanya, memanfaatkan sumber sekunder yang terdapat di perpustakaan berupa buku, jurnal, ensiklopedi, hasil-hasil penelitian dan internet untuk memperoleh data penelitiannya, tanpa memerlukan penelitian lapangan. Produk pertemuan Malino adalah ditandatangani sebuah perjanjian dan bukan sekedar pernyataan atau deklarasi, perlu diingat pula, bahwa pemerintah bertanda tangan bukan sebagai saksi yang gembira ketika dua kelompok yang bertikai dan mencapai kesepakatan melainkan sebagai pihak yang turut membuat perjanjian.

Abstract: *That caused the chaos in the social and political life of Indonesian society in general. And state in the weak position. This gives the opportunity to certain groups to do the actions as happened in Maluku by the Maluku Christians to toss his revenge on the Muslims and vice versa conflict in the Maluku January 19, 1999 then Walking in a few Tahuni (hereinafter called Maluk Conflict), has resulted in death and human abuse, property destroyer, forced forced religious force, and various other adverse consequences. In conflict It belongs to the corruption, crime and slimming, human rights (HAM), very high and be a record of history and dark and very bad in the course of mankind. This type of research is a library research with the history method, the research of satisfaction with the attacks of activities that are favorable to the method of data of the library, reading and recording and the processing of materials Researches are used only, utilising the existing secondary libraries in the form of books, journals, encyclopedias, research results and the Internet to acquire their research data, without requiring field research. Malino's meeting is signed and not just a statement or declarant, it is important to remember that the government is marked as a happy witness when the two groups are in the fight and reach an agreement Parties to make a treaty.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Maluku merupakan daerah dengan penduduk yang heterogen. Daerah Maluku merupakan daerah yang sejak lama dicari-cari oleh bangsa-bangsa Eropa karena daerah ini merupakan daerah yang kaya rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Kedatangan bangsa Eropa menyebabkan bangsa Maluku sejak saat itu telah membangun hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki peradaban yang berbeda. Sehingga mereka memiliki keunggulan tertentu yaitu nilai budaya cinta damai dalam bentuk pala, gandong, dan lolat (nama lambang perdamaian). Namun karena adanya kebijakan pemerintahan kolonial yang menjadikan Maluku sebagai penetrasi baik secara politik maupun sosial keagamaan (Islam dan Kristen) menyebabkan terjadinya suatu konflik antar masyarakat Maluku (kaum Islam dan kaum Kristen). Akibat dari segregasi tersebut masih berlangsung dan menguat pada masa setelah rezim Orde Baru. Sehingga baik dari elite politik maupun elite agama tidak mampu meyatukan masyarakat dan membuat konflik yang ada di Maluku menjadi konflik yang berkepanjangan.

Setelah peristiwa Reformasi yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia pada umumnya, dan negara dalam posisi lemah. Hal ini memberi Konflik di Maluku pada tahun 1999, menurut sebagian orang Maluku merupakan konflik keagamaan antara Islam dan Kristen. Konflik tersebut merupakan rantai panjang dari adanya ketidakadilan dan marginalisasi masyarakat akibat kebijakan pemerintah baik kolonial maupun republik.

Konflik di Maluku ini sangat menarik untuk dipelajari karena didalamnya terjadi berbagai hal yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut yaitu bukan hanya karena agama, tetapi juga karena perpolitikan, birokrasi, perekonomian yang menyebabkan kecemburuan sosial dan pada perkembangannya menyeret agama sehingga menimbulkan konflik besar yang berkepanjangan. Konflik di Maluku pada tahun 1999 telah menyebabkan banyak penderita bagi masyarakat Maluku sendiri serta hal ini tentu juga bisa mengancam kedaulatan bangsa Indonesia apabila terjadi disintegrasi bangsa.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan (Library research). Dengan metode historis, penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mustika Zet, 2008: 3).

Penelitian kepustakaan hanya memanfaatkan sumber sekunder yang terdapat dipustakaakan berupa buku, jurnal, ensiklopedia, hasil-hasil penelitian dan internet untuk memperoleh data penelitiannya, tanpa memerlukan penelitian lapangan. Jadi tidak menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk melihat langsung fakta sebagaimana adanya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Maluku adalah konflik etnis-politik yang melibatkan agama di Maluku, Indonesia, khususnya Ambon. Konflik ini bermula pada era Reformasi awal 1999 hingga penandatanganan Piagam Malini II tanggal 12 February 2002. Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan sesuai krisis ekonomi di Asia Tenggara. Rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperuncing permasalahan politik daerah yang sudah ada. Dari berbagai fakta dan pemberitaan yang ditemui selama Konflik Maluku, memberikan indikasi yang mendominasi pemikiran masyarakat bahwa agamalah (dalam hal ini agama Islam dan agama Kristen) sebagai penyebab konflik sehingga terbentuknya anggapan masyarakat bahwa konflik Maluku adalah konflik antar umat beragama.

1. Konflik Maluku

Rezim Suharto secara formal dinamai dengan Orde Baru dan kemandirian Bung Karno di belah menurut pembentukan Identitas sesuai dengan kelas ekonomi dan perhitungan politik atas pengontrol Identitas Abidin, 2019:36.

Perubahan-perubahan yang terjadi karena kepentingan ideologi, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan sebagainya yang melanda dan memengaruhi masyarakat dunia

yang berpengaruh pada keadaan di NKRI juga kondisi internal NKRI dengan berbagai perubahan sosial yang dialami, sangat berdampak pada kehidupan orang maluku yang diliputi dengan konflik itu.

proses sosial yang disosiatif dengan tingkat kekerasan yang sangat tinggi dan memakan korban yang sangat banyak. Konflik ini bukan konflik agama akan tetapi dilakukan oleh pusat lalu dijadikan agama sebagai alat, lebih banyak nuansa politik dalam konflik ini dari pada nuansa agama, jadi agama bukan sebagai penyebab tetapi agama sebagai alat.

Kekuatan ekonomi di Ambon sejak pertengahan 1980-an dan seterusnya dipegang oleh pegawai negeri, gaji, dan ketentuan moneter mereka lapangan kerja di Ambon dan angka dari tahun 1990 menyatakan 38 persen pekerja Ternate dipekerjakan oleh pemerintah. Ketergantungan pada posisi jabatan publik yang statis berarti bahwa pengangguran kaum muda di Ambon sangat tinggi, di benteng di Ambon 73,2 persen dari populasi terdaftar belum dipekerjakan pada tahun 1994, dan pemuda yang tidak puas, ini kebanyakan terdiri dari tentara konflik maluku.

Zaman orde Baru, gerakan Negara seperti sebuah kekuatan memusat dengan daya control yang ekspansif, seakan-akan menebas gapain ujung jemari tradisi musyawarah local yang mencoba menawarkan dirinya sebagai model "integralisme" yang masih sangat bersifat "elementer" itu kini justru telah menjadi kenyataan sejarah. Dan kita mungkin hanya biasa terpana dengan keliatan nagari dari provinsi maluku. Pemisahan ini didukung di semua sisi spektrum agama dan politik karena penduduk memiliki keprihatinan yang sama mengenai kesulitan logistik relatif yang terkait dengan jarak di wilayah ini.

Perubahan demografis juga telah disebut sebagai faktor dalam menciptakan ketegangan. Isu-isu khusus terkait dengan gangguan hak-hak tanah adat, atau adat yang umum bagi komunitas religius asli masyarakat maluku, namun tidak banyak perhatian pada migran baru yang tidak tertarik pada sistem aliansi tradisional.

Pendukung ambon sangat berpegang pada teori Pela Gandung, di mana desa-desa, yang

seringkali memiliki kepercayaan agama yang berbeda, "terikat oleh darah" untuk saling membantu dan perkawinan antara anggota desa dilarang, karena mereka berada di antara darah tau keluarga. Setiap pelanggaran terhadap peraturan ini akan dihukum dengan keras oleh kutukan dari nenek moyang yang mendirikan institusi tersebut. Aliansi memfasilitasi sebuah hubungan untuk memungkinkan perdamaian anantara desa-desa yang terstruktur secara kaku baik sepenuhnya Kristen maupun Islam dan telah membentuk unit politik terbesar masyarakat maluku sebelum negara Indonesia. Namun, sistem ini tidak dapat mengakomodasi kepemilikan tanah dari pemilik lahan transmigran berbasis non lokal, non pedesaan atau berbasis transmigran.

Ambon dan pulau-pulau sekitarnya memiliki jumlah penduduk Kristen dan Muslim yang hampir sama pada tahun-tahun sebelum krisis. Namun, dalam periode tiga dekade setelah kekosongan pegawai negeri dengan orang-orang yang ditunjuk oleh Muslim, dan telah disebut-sebut mencipkan kecemasan di dalam kounitas Kristen. Tentang potensi islamisasi maluku, berkontribusi pada ketegangan sektarian.

Konfrontasi komunal besar dengan migran Ambon di daerah ketapang di jakarta pada tanggal 22 November 1998, yang menyebabkan 14 orang terbunuh dan banyak pembakaran gereja menyusul desas-desus bahwa penjaga Kristen Ambon dari sebuah rumah perjudian yang signifikan setelah menghancurkan sebuah masjid. Sebagian besar dari 180 orang yang ditangkap segera setelah terjadinya kekerasan berasal dari Ambon. Sebelum membahas tentang sistem perdamaian yang dibangun oleh masyarakat Maluku dalam pasca Konflik Maluku terlebih dahulu kita pahami tentang sebuah kebijakan publik, karena kebijakan actor atau pejabat bias juga dapat mempengaruhi dinamika kehidupan social yang bias berpotensi konflik. Mak dari itu, pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam memformulasi hingga menetapkan sebuah kebijakan. -Kristen pertukaran tempat tidur ke kampung-kampung.

2. Pelaksanaan Perjanjian Malino

Tujuh belas tahun lalu atau pada 12 Februari 2002 di Malino, sebuah kota kecil di punggung bukit Sula-wesi Selatan (Sulsel), sebanyak 70 warga Maluku bersama pemerintah bertemu (Tripartit). Mereka menanda-tangani perjanjian untuk mengakhiri konflik ke-kerasan yang sudah berlangsung sejak tahun 1999. Peristiwa di Malino sebagai suatu tonggak sejarah, yang dibalut kenang-kenangan. Sebagai peristiwa sejarah, Malino telah menjadi sebuah titik balik yang menuntun kita dari sebuah kancah perang menuju damai. Sebagai peristiwa penuh kenangan, Malino dengan suasana batin perundingan, tidak hanya menjadi milik wakil-wakil negara dan 60 warga Islam-Kristen Maluku, melainkan juga seluruh elemen pemerintah dan seluruh rakyat Maluku yang diwakili. Produk pertemuan Malino adalah ditandatangani sebuah perjanjian dan bukan sekedar

Pernyataan atau deklarasi. Perlu diingat pula, bahwa pemerintah bertanda tangan bukan sebagai saksi yang gembira ketika dua kelompok yang bertikai telah mencapai kesepakatan, melainkan sebagai pihak yang turut membuat perjanjian. Hal ini berbeda dengan perjanjian Malino I yang hanya mengikat dua pihak, yaitu Islam-Kristen Sulawesi Tengah, tetapi perjanjian Malino II dibuat bersama dan mengikat tiga pihak yaitu Islam-Kristen Maluku serta pemerintah.

3. Naskah Kesepakatan Perjanjian

Konflik Maluku yang sudah berlangsung lebih tiga tahun ini, telah menyebabkan korban ribuan jiwa dan harta, kesengsaraan dan kesulitan masyarakat, membahayakan keutuhan NKRI serta menyuramkan masa depan masyarakat Maluku bersama pemerintah

lebih tiga tahun ini, telah menyebabkan korban ribuan jiwa dan harta, kesengsaraan dan kesulitan masyarakat, membahayakan keutuhan NKRI serta menyuramkan masa depan masyarakat Maluku. bersama pemerintah Republik Indonesia, sepakat mengikat diri dalam perjanjian:

- 1) Mengakhiri semua bentuk konflik dan kekerasan.

- 2) Menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, jujur, tidak memihak, dengan dukungan seluruh masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas.
- 3) Menolak, menentang dan menindak segala bentuk gerakan separatisme yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI.
- 4) Sebagai bagian dari NKRI, masyarakat Maluku berhak untuk berada, bekerja dan berusaha di seluruh wilayah Republik Indonesia, begitu pula sebaliknya, masyarakat Indonesia lainnya dapat berada, bekerja dan berusaha di wilayah Propinsi Maluku secara sah dan adil menjunjung tinggi kemajemukan dengan mengindahkan budaya setempat.

Produk pertemuan Malino adalah ditandatangani sebuah perjanjian dan bukan sekedar pernyataan atau deklarasi. Perlu diingat pula, bahwa pemerintah bertanda tangan bukan sebagai saksi yang gembira ketika dua kelompok yang bertikai telah mencapai kesepakatan, melainkan sebagai pihak yang turut membuat perjanjian. Hal ini berbeda dengan perjanjian Malino I yang hanya mengikat dua pihak, yaitu Islam-Kristen Sulawesi Tengah, tetapi perjanjian Malino II.

4. Pihak-pihak yang berjanji

Dari berbagai fakta dan pemberitaan yang ditemui selama Konflik Maluku, memberikan indikasi yang mendominasi pemikiran masyarakat bahwa agamalah (dalam hal ini agama Islam dan agama Kristen) sebagai penyebab konflik Indikator penyebab konflik Maluku yang intinya adalah menyalahkan masyarakat Maluku sebagai penyebab konflik Maluku. Namun demikian Lambang Trijono juga mengkonstatir adanya pihak lain tidak langsung bukan kelompok agama, yaitu dari kelompok kepentingan politik tertentu yang ikut bermain menggerakkan atau memanfaatkan isu agama dan etnis dalam konflik. Produk pertemuan Malino adalah ditandatangani sebuah perjanjian dan bukan sekedar pernyataan atau deklarasi. Perlu diingat pula, bahwa pemerintah bertanda tangan

bukan sebagai saksi yang gembira ketika dua kelompok yang bertikai telah mencapai kesepakatan, melainkan sebagai pihak yang turut membuat perjanjian.

Berikut merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian Malino.

Tabel 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian Malino

No	Pihak Pemerintah	Pihak Peninjau
1.	Jusuf Kalla Menko Kesra	Prof. Dr. Din Syamsuddin Sekum MUI
2.	Da'i Bachtiar, SH KAPOLRI	Dr. I. P. Lambe Sekum PGI
3.	Ir. M. Saleh Latuconsina Gubernur Maluku	Mayjen. Bambang Soetedjo Deputi Poldagri
4.	Drs. Soenarko D. A KAPOLDA Maluku	Dr. Mulyani A. Nurhani Irlen DEPDIKNAS

D. SIMPULAN DAN SARAN

Sejarah bagian dari sebuah pembelajaran yang akan menjawab semua pertanyaan mengenai masa lalu, kini dan akan datang. Konflik Maluku selalu menjadi sebuah peristiwa yang harus kita pelajari dan pahami bersama, dengan demikian kita mengetahui kita ketahui bagaimana sebuah dominasi yang terjadi saat ini Rezim Suharto secara formal dinamai dengan Orde Baru dan kemanunggalan Bung Karno di belah menurut pembentukan Identitas sesuai dengan kelas ekonomi dan perhitungan politik atas pengontrol Identitas Abidin, 2019:36.

Perubahan-perubahan yang terjadi karena kepentingan ideologi, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan sebagainya yang melanda dan memengaruhi masyarakat dunia yang berpengaruh pada keadaan di NKRI juga kondisi internal NKRI dengan berbagai perubahan sosial yang dialami, sangat berdampak pada kehidupan orang maluku yang diliputi dengan konflik itu. diwariskan oleh leluhurnya. Kita akan tahu bagaimana sebuah kepentingan kelompok akan merugikan orang banyak, membenarkan perilaku yang salah, bahkan dapat merubah seorang manusia menjadi seekor manusia agar segala kepentingan yang dapat terpenuhi. Dengan memahami sejarah kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama, Karen tupai pun tak pernah terjatuh pada lubang yang sama.

REFERENSI

- [1] Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [2] Pruitt, Dean G. dan Rubin, Jeffrey Z. (2014). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Susan, Vovri. (2017). *Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [4] Idhamsyah dan Ardiningtiyas. (2012). *Psikologi Prasangka (Sebab, Dampak, Dan Solusi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [5] Wijono, Sutarto. (2012). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- [6] Ritzer, George dan Goodman, Douglas. J. (2018). *Teori Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- [7] Soetomo. (2012). *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- [8] Patrik, Purnawahid. (1988). *Hukum Perdata II*. Semarang: Undip.
- [9] Setiawan, R. (2012). *Pokok-Pokok Hukum Perikanan*. Bandung; Bina Cipta.
- [10] Waileruny, Semuel. (2011). *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [11] Koentjaraningrat. (2015). *Masala-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- [12] Stoadih, Nana. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.